

**LAPORAN KEGIATAN
PENELITIAN**



**Strategi Pemerintah Kabupaten Pesawaran Dalam
Penanggulangan Bencana Alam Tahun 2017**

oleh:

Drs. Piping Setia Priangga, M.Si (Ketua)

NIP. 19581204198606 1 001

Drs. Aman Toto Dwijono, M.H (Anggota)

NIP. 19570728 198703 1 006

Dr. Feni Rosalia, Msi (Anggota)

NIP. 196902191994032001

Andri Marta, S.I.P, M.I.P (Anggota)

**Dibiayai oleh Dana DIPA FISIP Universitas Lampung
dengan Nomor Kontrak: 334/UN.26/6/KU/2017
tanggal 10 Mei 2017**

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2017**

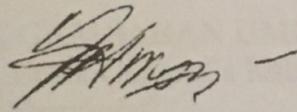
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

1. Judul Penelitian : Strategi Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam Penanggulangan Bencana Alam Tahun 2017
2. Bidang Pengabdian : Sosial dan Pemerintahan
3. Ketua Tim Pelaksana
 - a. Nama Lengkap : Drs. Piping Setia Priangga, M.Si
 - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - c. NIP : 19581204 198608 1001
 - d. Disiplin Ilmu : Ilmu pemerintahan
 - e. Pangkat/Golongan : III c
 - f. Jabatan : Lektor
 - g. Fakultas/Jurusan : FISIP / Ilmu Pemerintahan
 - h. Alamat Kantor : Jl. Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedong Meneng, Kota Bandar Lampung
 - i. Telepon/Fax/Email : 085100471773
4. Jumlah Anggota : 3 Orang
Dr. Feni Rosalia, M.Si
Drs. Aman Toto Dwijono, M.H
Andri Marta, S.IP., M.IP
5. Lokasi : Kabupaten Pesawaran
6. Jumlah Biaya : Rp. 7.000.000,-

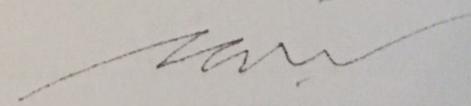
Bandar Lampung, Agustus 2017

Kajur Ilmu Pemerintahan FISIP

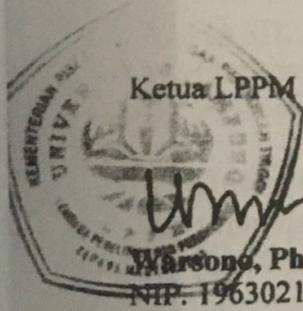
Ketua



Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP
NIP. 19611218 198902 1 001



Drs. Piping Setia Priangga, M.Si
NIP. 19581204 198608 1001



KEMENTERIAN RI UNIVERSITAS LAMPUNG	
TGL	23-12-2019
NO	209 / 4476 / 8 / Lppm / 2019
JENIS	Penelitian
DPAP	81

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bencana alam merupakan salah satu hal yang sangat krusial yang hampir di alami oleh berbagai macam negara yang ada pada belahan dunia. Bencana alam juga sering disebut juga dengan istilah *forcemajore* yaitu sesuatu hal yang berada di luar kontrol manusia. Pada prinsipnya masyarakat yang ada pada suatu negara harus siap dan mengatasi bencana tersebut. Di perlukan suatu kearifan lokal dari masyarakat untuk mengatasi suatu permasalahan bencana alam termasuk di Indonesia itu sendiri. Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan akan bencana alam.

Indonesia adalah negara yang sudah rawan terhadap bencana alam seperti banjir, bencana, badai, tanah longsor, letusan gunung berapi, dan kebakaran pada berbagai lahan berhutan. Indonesia telah mengalami bencana terkait iklim yang lebih sering dan parah dalam beberapa tahun terakhir. Bencana terkait banjir dan angin kencang mencakup sekitar 70% dari total bencana dan sisanya 30% terkait dengan bencana bencana, tanah longsor, kebakaran hutan, gelombang panas, badai, *rob*, dan lain-lain. Dalam periode 2003-2005 saja, ada sekitar 1.429 kejadian bencana di Indonesia. Sekitar 53,3 persennya terkait bencana hidro-meteorologi (Bappenas dan Bakornas PB, 2006).

Kenaikan permukaan laut menimbulkan risiko lebih lanjut. Sekitar 24 pulau-pulau kecil Indonesia sudah terendam (Departemen Kelautan dan Perikanan 2007). Rentang Kepulauan Indonesia yang luas ini - dengan lebih dari 17.000 pulau dan lebih dari 80.000 km garis pantai - dan mayoritas penduduk yang tinggal di wilayah pesisir di mana sebagian besar kegiatan ekonomi negara itu terjadi sangat rentan terhadap kenaikan permukaan laut. Saat ini, sekitar 42 juta orang di Indonesia tinggal di daerah dengan ketinggian kurang dari 10 meter di

atas permukaan laut (Pemerintah Indonesia 2007). Sebagian besar rumah tangga yang tinggal di daerah pesisir memiliki pendapatan antara US \$ 2 dan US \$ 1-per hari, yang merupakan batas garis kemiskinan (Indonesia Poverty Analysis Program 2006). Mereka merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Kepadatan penduduk yang tinggi di Indonesia akan lebih meningkatkan kerentanan terhadap bencana iklim.

Penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional, yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Seringkali bencana hanya ditanggapi secara parsial oleh pemerintah. Bahkan bencana hanya ditanggapi dengan pendekatan tanggap darurat (*emergency response*) (Depkominfo, 2007: 12).

Pemerintah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi fokus rekonstruksi dan rehabilitasi dari pascabencana. Proses penanggulangan bencana ini harus di kerjakan secara serius dan komprehensif oleh pemerintah pusat maupun daerah. Jaminan pemenuhan hak masyarakat yang terkena bencana alam tersebut harus secara adil dan sesuai dengan standar penanggulangan bencana yang harus di upayakan pelayananny, hal ini bertujuan untuk mengantisipasi korban yang lebih banyak. Pemulihan kondisi dari dampak bencana dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran dan belanja negara yang memadai dan siap pakai dalam rekonstruksi dan rehabilitasi seharusnya menjadi jaminan bagi korban bencana.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana diharapkan akan semakin baik dan semakin terarah, karena pemerintahan dan pemerintah daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan dalam penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana dilakukan secara terarah mulai prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana. Selain dari Undang-undang pemerintah mengeluarkan peraturan turunan dari uu tersebut yaitu, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 48 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD yang diikuti beberapa aturan pelaksana terkait, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah. Pada UU tersebut yang terdapat pada pasal 35 dan 36 dinyatakan bahwa bahwa setiap daerah harus memiliki perencanaan dalam penanggulangan bencana.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas bahwa Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota mulai mengembangkan kebijakan, strategi, dan operasi penanggulangan bencana sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Upaya penanggulangan bencana dan strategi penanggulangan bencana harus mulai diterapkan di daerah sesuai dengan kondisi geografis daerah tersebut. Operasi penanggulangan bencana secara nasional harus dipastikan berjalan efektif, efisien dan berkelanjutan. Untuk mendukung pengembangan sistem penanggulangan bencana yang mencakup kebijakan, strategi dan operasi secara nasional mencakup pemerintah pusat dan daerah maka perlu dimulai dengan mengetahui sejauh mana penerapan peraturan terkait dengan penanggulangan bencana di daerah.

Kabupaten Pesawaran salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Lampung yang merupakan pemekaran Kabupaten Lampung Selatan. Secara geografis Kabupaten Pesawaran terletak pada koordinat 104,920 - 105,340' Bujur Timur, dan 5,120 - 5,840 Lintang Selatan. Secara administratif luas wilayah Kabupaten Pesawaran adalah 1.173,77 KM². Kabupaten Pesawaran memiliki 11 kecamatan yaitu, Kecamatan Padang Cermin, Punduh Pidada, Kedondong, Way Lima, Gedong Tataan, Negeri Katon dan Kecamatan Tegineneng, Marga Punduh, Way Khilau, Kecamatan Teluk Pandan dan Kecamatan Way Ratai.

Berdasarkan data sensus jumlah penduduk Tahun 2010, Kabupaten Pesawaran memiliki jumlah penduduk 398.848 jiwa, Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, hasil sensus penduduk menunjukkan bahwa di pesawaran terdapat 206.223 jiwa penduduk laki-laki dan 192.625 jiwa penduduk perempuan.

Tofografi atau kondisi permukaan bumi Kabupaten Pesawaran merupakan daerah dataran rendah, dan dataran tinggi, yang sebagian merupakan daerah perbukitan sampai dengan pergunungan dengan ketinggian dari permukaan laut yang bervariasi antara 0,0 M sampai dengan 1.682,0 M. Berdasarkan hasil interpretasi data SRTM, ketinggian lahan di wilayah Kabupaten Pesawaran dapat dibagi menjadi 7 (tujuh kelas) antara lain : 0-100 meter dpl, 100-200 meter dpl, 200-300 meter dpl, 300-400 meter dpl, 400-500 meter dpl, 500-600 meter dpl, dan > 600 meter dpl. Kabupaten Pesawaran merupakan daerah tropis, pada tahun 2008 dengan rata-rata curah hujan di Kabupaten Pesawaran berkisar antara 161,8 mm/bulan, dan rata-rata jumlah hari hujan 13,1 hari/bulan. Rata-rata temperatur suhu berselang antara 22,9°C - 32,4°C. Selang rata-rata kelembaban relatifnya adalah antara 56,8% sampai dengan 93,1%. Sedangkan rata-rata tekanan udara minimal dan maksimal di Kabupaten Pesawaran adalah 1008,1 Nbs dan 936,2 Nbs.

Berdasarkan analisis terhadap data iklim historis yang panjang, ditemukan bahwa ada perubahan trend dan variabilitas variabel iklim seperti suhu dan curah hujan. Bukti paling nyata dapat dilihat dari trend peningkatan suhu permukaan rata-rata selama 100 tahun terakhir di kota itu. Perubahan curah hujan musiman juga ditemukan, yaitu pergeseran awal musim dan perubahan frekuensi curah hujan ekstrim. Berdasarkan 14 model iklim global (GCM), diindikasikan bahwa curah hujan musim basah (musim hujan) Kabupaten Pesawaran di masa depan mungkin sedikit meningkat, terutama di kawasan pesisir. Sebaliknya, curah hujan musim kering (JJA) akan menurun.

Kabupaten Pesawaran harus menyadari bahwa kondisi iklim yang sering terjadi akhir-akhir ini bisa menyebabkan bencana alam yang datang tiba-tiba yang dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Untuk itu diperlukan

suatu strategi oleh pemerintah daerah setempat dalam penanggulangan bencana yang mulai di persiapkan pola penanganan terhadap bencana hingga proses evakuasi dan penyelesaian tentang bencana tersebut. Oleh karena itu maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang ***“Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran dalam Penanggulangan Bencana Tahun 2017”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

“Bagaimana Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran dalam Penanggulangan Bencana Tahun 2017?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran dalam Penanggulangan Bencana Tahun 2017. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Pesawaran dalam menanggulangi suatu bencana alam yang terdapat di kabupaten ini.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan secara teoritis hasil penelitian ini akan memperkaya kajian tentang politik lingkungan yang mengkaji tentang strategi pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana akibat perubahan iklim yang saat ini mulai berubah-ubah. Sehingga dengan kesiapan pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana maka proses penanggulangan dan evakuasi terhadap bencana alam dapat di atasi dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Strategi

1. Pengertian Strategi

Menurut Nawawi (2012:147) dari sudut etimologis berarti penggunaan kata “strategik” dalam manajemen sebuah organisasi, dapat diartikan sebagai kiat, cara dan taktik utama yang dirancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yang terarah pada tujuan strategik organisasi.

Menurut Assauri (2013:12) istilah strategi dirumuskan sebagai suatu tujuan yang ingin dicapai, upaya untuk mengomunikasikan apa saja yang akan dikerjakan oleh siapa yang mengerjakannya, bagaimana cara mengerjakannya, serta kepada siapa saja hal-hal tersebut pula dikomunikasikan, dan juga perlu dipahami mengapa hasil kinerja tersebut perlu dinilai. Suatu strategi terdiri dari suatu kumpulan pilihan yang terintegrasi, dan perlu dipahami bahwa pilihan tersebut belum tentu dapat menjangkau atau memenuhi pilihan yang dianggap penting dari suatu hal yang dihadapi oleh pimpinan atau eksekutif. Secara jelas strategi merupakan suatu peralatan komunikasi, dimana orang strategis harus berupaya untuk dapat meyakinkan bahwa orang yang tepatlah yang dapat mengetahui apa maksud dan tujuan dari organisasinya, serta bagaimana hal tersebut ditempatkan dalam pelaksanaan aksinya, atau direalisasikannya. Berdasarkan uraian tersebut, strategi diarahkan atau dialamatkan, bagaimana organisasi itu berupaya memanfaatkan atau mengusahakan agar dapat memengaruhi lingkungannya, serta memilih upaya pengorganisasian internal, dimana yang terakhir ini bukan merupakan bagian dari strategi.

Menurut Effendy (2004:300) strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Di dalam penggunaan strategi, ada yang disebut dengan manajemen strategis (strategic management) yang merupakan proses manajemen yang komprehensif dan berkelanjutan yang ditujukan untuk memformulasikan dan mengimplementasikan strategi yang efektif.

Perlu didasari bahwa pada dasarnya strategi yang dijelaskan oleh suatu organisasi adalah sekumpulan komitmen atau tindakan atau aksi yang terintegrasi dan terkoordinasi, untuk mengusahakan atau mengolah kompetensi dan sekaligus guna mendapatkan keunggulan bersaing organisasi. Strategi yang dijalankan organisasi seperti yang digambarkan tersebut, sering dikaitkan dengan upaya pengintegrasian dan pengalokasian sumber-sumber daya, kapabilitas dan kompetensi organisasi, agar dapat memperoleh keberhasilan di dalam lingkungan eksternalnya yang selalu berubah.

2. Jenis-Jenis Strategi

Adapun dijelaskan oleh Wecheler dan Backoff dkk (2010:63) jenis-jenis strategi meliputi :

- a) Strategi ekspansi : penerapan strategi terutama sekali ditujukan bagi peningkatan status, kapasitas, serta sarana-sarana yang berdampak mampu memberi sentuhan warna masa depan keorganisasian yang selaras zaman.
- b) Strategi transformasi : pada strategi ini ditandai oleh adanya kebutuhan dari organisasi untuk memenuhi tekanan internal ataupun internal, yang pada prinsipnya dilakukan demi terjadinya perubahan fundamental.
- c) Strategi isolasi : strategi isoasi yang memiliki ciri adanya penolakan aktif terhadap tekanan eksternal yang tengah dihadapi oleh organisasi.

3. Tipe-Tipe Strategi

Menurut Salusu (2006:104) tipe-tipe strategi meliputi :

- a) Strategi organisasi : strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif-inisiatif strategi yang baru.
- b) Strategi program : strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi strategi dari suatu program tertentu.
- c) Strategi pendukung : strategi ini memusatkan perhatian pada pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas organisasi.
- d) Strategi kelembagaan : fokus dari strategi institusional adalah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi.

4. Evaluasi Dari Strategi

Dikaitkan dengan penelitian ini yaitu Strategi Pemerintah Kabupaten Pesawaran Dalam Penanggulangan Bencana Alam Tahun 2017, menurut Akdon (2009:277) meliputi upaya-upaya untuk memonitor seluruh hasil-hasil dari pembuatan dan penerapan strategi termasuk mengukur kinerja organisasi serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Menurut Assauri (2013:15) keberhasilan suatu strategi sangat dipengaruhi oleh implementasi strategi yang efektif, yang ditentukan oleh tingkat kemampuan dari kepemimpinan strategi. Implementasi strategi adalah proses eksekusi strategi, yang menekankan pada tindakan menempatkan strategi ke dalam pengaruh yang menjamin keputusan organisasi dan konsisten.

Proses implementasi mencakup penyaringan untuk membersihkan dan mengubah suatu strategi, menjadi informasi yang dibuat tersedia melalui upaya implementasi terdahulu, sedangkan tujuan dari implementasi adalah untuk membuat lebih terjaminnya perumusan strategi menjadi lebih komprehensif dan lebih terinformasi secara baik. Tujuan lainnya adalah menerjemahkan gagasan yang

tepat ke dalam tindakan yang dapat dieksekusi, yang kadang-kadang dapat menghasilkan gagasan yang lebih baik.

B. Tinjauan Tentang Bencana Alam

1. Pengertian Bencana Alam

Istilah bencana dapat diartikan sebagai sesuatu yang menimbulkan kesusahan, kerugian, penderitaan, malapetaka, kecelakaan dan mara bahaya. Menurut Nurrachman (2007:3) bencana merupakan kejadian yang luar biasa, diluar kemampuan normal seseorang menghadapinya, menakutkan dan juga mengancam keselamatan jiwa. Akibatnya, berbagai bangunan penting hancur, korban jiwa berjatuh dan memengaruhi kondisi psikologis dari mereka yang terkena dampak bencana.

Menurut Kodoatie dan Sjarief (2004:67) bencana merupakan gangguan atau kekacauan pada pola normal kehidupan. Gangguan atau kekacauan ini biasanya hebat, terjadi tiba-tiba, tidak disangka-sangka dan wilayah cakupan cukup luas. Dampak kepada manusia seperti kehilangan jiwa, luka-luka dan kerugian harta benda. Dampak ke pendukung utama struktur sosial dan ekonomi seperti kerusakan infrastruktur berupa sistem jalan, air bersih, listrik, komunikasi dan pelayanan penting lainnya.

Menurut Sembiring (2009:10) bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Menurut Tohari (2008:58) bencana alam adalah konsekuensi dari kombinasi aktivitas alami (suatu peristiwa fisik, seperti letusan gunung, gempa bumi, tanah longsor) dan aktivitas manusia. Kerugian yang terjadi dalam bidang keuangan dan struktural, bahkan sampai kematian yang disebabkan karena ketidakberdayaan manusia akibat kurang ancaman dan kerentanan bencana baiknya manajemen

keadaan darurat. Kerugian yang dihasilkan tergantung pada kemampuan untuk mencegah atau menghindari bencana dan daya tahan mereka. Pemahaman ini berhubungan dengan pernyataan : “Bencana muncul bila ancaman bahaya bertemu dengan ketidakberdayaan”. Dengan demikian, aktivitas alam yang berbahaya tidak akan menjadi bencana alam di daerah tanpa ketidakberdayaan manusia, misalnya gempa bumi di wilayah tidak berpenghuni. Konsekuensinya, pemakaian istilah alam juga ditentang karena peristiwa tersebut bukan hanya bahaya atau malapetaka tanpa keterlibatan manusia. Besarnya potensi kerugian juga tergantung pada bentuk bahayanya sendiri, mulai dari kebakaran, yang mengancam bangunan individual, sampai peristiwa tabrakan meteor besar yang berpotensi mengakhiri peradaban umat manusia.

2. Jenis – Jenis Bencana Alam

Menurut (Data Informasi Bencana Indonesia, DIBI-BNPPB:2008) dilihat dari potensi bencana yang ada, Indonesia merupakan negara dengan potensi bahaya (hazard potency) yang sangat tinggi dan beragam baik berupa bencana alam, bencana ulah manusia ataupun kedaruratan kompleks. Beberapa potensi tersebut antara lain adalah gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, bencana, kebakaran lahan dan hutan, kebakaran perkotaan dan permukiman, angin badai, wabah penyakit, kegagalan teknologi dan konflik sosial. Potensi bencana yang ada di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok utama, yaitu potensi bahaya utama (*main hazard*) dan potensi bahaya ikutan (*collateral hazard*).

Potensi bahaya utama (*main hazard potency*), antara lain dapat dilihat pada peta rawan bencana gempa di Indonesia yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah wilayah dengan zona-zona gempa yang rawan, peta kerentanan bencana tanah longsor, peta daerah bahaya bencana letusan gunung api, peta potensi bencana tsunami, peta potensi bencana bencana, banjir, dan lain-lain.

Menurut Sembiring (2009:11) dalam UU RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, berdasarkan jenis dan klasifikasinya, bencana yang terjadi dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :

- a) Bencana alam : bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, bencana, angin topan dan tanah longsor.
- b) Bencana non-alam : bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
- c) Bencana sosial : bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa karena manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

3. Penyebab Bencana Alam

Menurut Kodoatie dan Sjarief (2004: 68) penyebab bencana dapat dibagi menjadi dua yaitu alam dan manusia atau dapat juga karena faktor keduanya. Secara alami bencana akan selalu terjadi di muka bumi, misalnya tsunami, gempa bumi, gunung meletus, jatuhnya benda-benda dari langit ke bumi, tidak adanya hujan pada suatu lokasi dalam waktu yang relatif lama sehingga menimbulkan bencana bencana atau sebaliknya curah hujan yang sangat tinggi di suatu lokasi menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor. Bencana oleh aktivitas manusia adalah terutama akibat eksploitasi alam yang berlebihan, alih tata guna lahan.

C. Tahap Penanggulangan Bencana

Berdasarkan penjelasan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (2012:884) upaya penanggulangan bencana merupakan usaha berkelanjutan yang direncanakan dan dikoordinir untuk mereduksi atau meminimalisir dampak suatu bencana dengan tujuan agar masyarakat daerah rawan bencana merasa aman dalam melakukan aktivitas sehari-hari, namun tetap mengerti dan memahami betul kondisi lingkungannya sehingga selalu waspada.

Menurut Soeladi (1995:9) penanggulangan bencana tidak dapat dilaksanakan dengan mengandalkan suatu instansi saja, melainkan mutlak diperlukan adanya kerja sama antar instansi, karena sebagai suatu sistem kerja sama, disini dapat secara langsung bersama-sama menangani proyek tertentu, namun juga dapat secara partial yaitu tidak langsung, dimana saling melengkapi untuk penanggulangan bencana yang terjadi di suatu daerah. Penanggulangan bencana meliputi lima fase umum, yaitu prediksi (prediction), peringatan (warning), bantuan darurat (emergency relief), rehabilitasi (rehabilitation), rekonstruksi (reconstruction).

Fase-fase tersebut dijabarkan lebih lanjut dengan mengacu pada UN/ISDR (2002) antara lain, sebagai berikut :

- a) Prediksi (prediction) : dalam fase ini, dilakukan kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan melalui langkah-langkah struktural dan non-struktural. Langkah struktural yaitu langkah yang dilakukan untuk mengurangi dampak buruk dari bencana alam, kerusakan lingkungan dan bencana teknologi. Sedangkan langkah non-struktural yaitu tindakan yang diambil pada saat awal terjadi bencana untuk memastikan respon yang efektif terhadap dampak bahaya, termasuk peringatan dini yang efektif dan tepat waktu, serta evakuasi sementara penduduk dan barang dari lokasi terancam bencana.
- b) Peringatan (warning) : fase ini mengacu pada penyediaan informasi yang efektif dan tepat waktu melalui lembaga-lembaga yang terpercaya, agar individu dapat mengambil tindakan untuk menghindari atau mengurangi resiko dan mempersiapkan respon yang efektif.
- c) Bantuan darurat (emergency relief) : pemberian bantuan atau pertolongan selama atau segera setelah bencana terjadi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan yang mendasar orang-orang yang terkena. Hal ini dapat langsung dalam jangka pendek atau jangka panjang.
- d) Rehabilitasi (rehabilitation) : fase ini mencakup keputusan dan tindakan yang diambil setelah bencana dengan tujuan untuk memulihkan atau memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat serta mendorong dan

memfasilitasi penyesuaian yang diperlukan untuk mengurangi resiko bencana.

- e) Rekonstruksi (reconstruction) : fase ini mencakup semua kegiatan yang penting dilakukan dalam jangka panjang yaitu fase prediksi berupa mitigasi dan kesiapsiagaan, fase respon terhadap peringatan dan pemberian bantuan darurat, serta fase pemulihan berupa rehabilitasi dan rekonstruksi.

Menurut Soeladi (1995:16) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, agar setiap kegiatan dalam setiap tahapan dapat berjalan dengan terarah, maka disusun suatu rencana yang spesifik pada setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- a) Pada tahap prabencana dalam situasi tidak terjadi bencana, dilakukan penyusunan rencana penanggulangan bencana (disaster management plan), yang merupakan rencana umum dan menyeluruh yang meliputi seluruh tahapan atau bidang kerja kebencanaan. Secara khusus untuk upaya pencegahan dan mitigasi bencana tertentu terdapat rencana yang disebut rencana mitigasi misalnya rencana mitigasi bencana bencana.
- b) Pada tahap prabencana dalam situasi terdapat potensi bencana dilakukan penyusunan rencana kesiapsiagaan untuk menghadapi keadaan darurat yang didasarkan atas skenario menghadapi bencana tertentu (single hazard) maka disusun satu rencana yang disebut rencana kontinjensi (contingency plan).
- c) Pada saat tanggap darurat dilakukan rencana operasi (operational plan) yang merupakan operasionalisasi atau aktivasi dari rencana kedaruratan atau rencana kontinjensi yang telah disusun sebelumnya.
- d) Pada tahap pemulihan dilakukan penyusunan rencana pemulihan (recovery plan) yang meliputi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan pada pasca bencana. Sedangkan jika bencana belum terjadi, maka untuk mengantisipasi kejadian bencana di masa mendatang dilakukan penyusunan petunjuk atau pedoman mekanisme penanggulangan pasca bencana.

Perencanaan dalam penanggulangan bencana, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Rangkaian kegiatan tersebut apabila digambarkan dalam siklus penanggulangan bencana pada dasarnya penyelenggaraan adalah tiga tahapan yakni :

- a) Prabencana : situasi tidak terjadi bencana dan situasi terdapat potensi bencana.
- b) Saat tanggap darurat : yang dilakukan dalam situasi terjadi bencana.
- c) Pascabencana : yang dilakukan dalam saat setelah terjadi bencana.

Tahapan bencana yang digambarkan di atas, sebaiknya tidak dipahami sebagai suatu pembagian tahapan yang tegas, dimana kegiatan pada tahap tertentu akan berakhir pada saat tahapan berikutnya dimulai, akan tetapi harus dipahami bahwa setiap waktu semua tahapan dilaksanakan secara bersama-sama dengan porsi kegiatan yang berbeda. Misalnya pada tahap pemulihan, kegiatan utamanya adalah pemulihan tetapi kegiatan pencegahan dan mitigasi juga sudah dimulai untuk mengantisipasi bencana yang akan datang. Perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis resiko bencana dan upaya penanggulangannya yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya. Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program atau kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan. Rencana penanggulangan bencana ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan untuk jangka waktu 5 tahun.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell, 1998:15). Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007:3) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan.

Peneliti dalam penelitian ini bertujuan mengetahui Strategi Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam Penanggulangan Bencana Alam Tahun 2017. Selanjutnya pola penanggulangan dan pola antisipasi pemerintah daerah terhadap kondisi iklim yang tidak menentu yang bisa menyebabkan datangnya bencana secara tiba-tiba.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan penelitian pada beberapa aspek kesiapan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana alam dengan mengkaji:

1. Bencana apakah yang pernah atau sering sekali menghampiri atau yang sering terjadi di Kabupaten Pesawaran
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya suatu bencana di Kabupaten Pesawaran.

3. Mekanisme Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana dan Kesiapsiagaan terhadap datangnya suatu bencana akibat perubahan iklim saat ini.
4. Upaya Kerjasama yang di lakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan kesiapsiagaan terhadap datangnya suatu bencana .

C. Narasumber Penelitian

Untuk memenuhi ketentuan perlunya triangulasi data dalam penelitian kualitatif, maka riset ini menentukan narasumber atas dasar prinsip tersebut. Oleh karena itu narasumber untuk penelitian ini adalah :

1. Pemerintah Kabupaten Pesawaran yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
2. Pemerintah Kecamatan yang terdiri dari 11 Kecamatan di Kabupaten Pesawaran.
3. Warga Masyarakat yang berada di 11 Kecamatan di Kabupaten Pesawaran.

D. Teknik Pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian menggunakan teknik dokumen, wawancara, dan triangulasi. Berikut ini akan dijelaskan satu per satu teknik tersebut dan penggunaannya dalam penelitian ini.

1. Teknik Wawancara

Metode wawancara adalah “proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan” (Supardi, 2006 : 99). Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa “wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu wawancara yang akan mengajukan pertanyaan dan orang yang akan diwawancarai yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang akan diajukan” (Moleong, 2005 : 186)

Prosedur wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin adalah “kombinasi antara wawancara bebas dengan terpimpin” (Supardi, 2006 :100). Jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara harus pandai mengarahkan yang diwawancarai apabila ternyata ia menyimpang.

2. Tehnik Dokumen.

G.J. Renier, sejarawan terkemuka dari University college Lodon, (1997; 104) menjelaskan istilah dokumen dalam tiga pengertian, pertama dalam arti luas, yaitu yang meliputi semua sumber, baik sumber tertulis maupun lisan; kedua dalam arti sempit, yaitu yang meliputi semua sumber tertulis saja; ketiga dalam arti spesifik, yaitu hanya yang meliputi surat-surat resmi dan surat-surat Negara, seperti surat perjanjian, undang-undang konsesi, hibah dan sebagainya.

Dari berbagai pengertian di atas, dikaitkan dengan penelitian ini, maka dapat ditarik benang merahnya bahwa dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semua itu memberikan informasi bagi proses penelitian.

3. Teknik Triangulasi

Triangulasi merupakan cara pemeriksaan keabsahan data yang paling umum digunakan. Cara ini dilakukan dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam kaitan ini Patton (dalam Sutopo, 2006: 92) menjelaskan teknik triangulasi yang dapat digunakan. Teknik triangulasi yang dapat digunakan menurut Patton meliputi: a) triangulasi data; b) triangulasi peneliti; c) triangulasi metodologis; d) triangulasi teoretis. Pada dasarnya triangulasi merupakan teknik yang didasari pola pikir fenomenologi yang bersifat multi perspektif. Artinya, guna menarik suatu kesimpulan yang mantap diperlukan berbagai sudut pandang berbeda.

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

E. Teknik Analisa Data

Proses analisis data diawali dengan menelaah seluruh data yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber yaitu wawancara, dan kajian dokumen (pustaka). Langkah berikutnya reduksi data yang dilakukan dengan cara abstraksi. Abstraksi merupakan upaya membuat rangkuman dari segala data yang ada. Kemudian, menyusunnya dalam satuan-satuan. Satuan-satuan ini dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Pengkategorian ini dilakukan dengan cara koding. Selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan keabsahan data. Langkah terakhir, penafsiran data yang telah untuk diuji (verifikasi) untuk dijadikan teori substansif dengan menggunakan beberapa metode tertentu.

BAB IV. GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis Kabupaten Pesawaran

Kabupaten Pesawaran adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia. Kabupaten ini diresmikan pada tanggal 2 November 2007 berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran. Semula kabupaten ini merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Selatan. Daerah ini kaya akan sumberdaya alam pertanian, perkebunan dan kehutanan. Secara umum memiliki iklim hujan tropis sebagaimana iklim Provinsi Lampung pada umumnya, curah hujan per tahun berkisar antara 2.264 mm sampai dengan 2.868 mm dan hari hujan antara 90 sampai dengan 176 hari/tahun.

Arus angin di Kabupaten Pesawaran bertiup dari Samudra Indonesia dengan kecepatan rata-rata 70 km/hari atau 5,83 km/jam. Sedangkan temperatur udara berkisar antara 26 °C sampai dengan 29 °C dan suhu rata-ratanya adalah 28 °C. Secara geografis Kabupaten Pesawaran terletak pada koordinat 104,92° - 105,34° Bujur Timur, dan 5,12° - 5,84° Lintang Selatan. Secara administratif luas wilayah Kabupaten Pesawaran adalah 1.173,77 KM² dengan batas-batas wilayah adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Teluk Lampung Kabupaten Tanggamus
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung

Posisi geografis yang demikian, maka Kabupaten Pesawaran merupakan daerah penyangga Ibukota Provinsi Lampung. Secara keseluruhan luas wilayah

Kabupaten Pesawaran adalah 1.173,77 Km² atau 117.377 Ha dengan Kecamatan Padang Cermin sebagai kecamatan terluas, yaitu 31.763 Ha.

Berdasarkan luas keseluruhan Kabupaten Pesawaran tersebut, 13.121 Ha digunakan sebagai lahan sawah, sedangkan sisanya yaitu 104.256 Ha merupakan lahan bukan sawah dan lahan bukan pertanian. Jenis penggunaan lahan sawah yang terbanyak adalah irigasi teknis dengan dua kali penanaman padi dalam setahun. Sedangkan jenis penggunaan lahan bukan sawah yang terbanyak adalah hutan negara.

Kabupaten Pesawaran terdiri atas 37 (tiga puluh tujuh) pulau. Tiga pulau yang terbesar adalah Pulau Legundi, Pulau Pahawang, dan Pulau Kelagian. Kabupaten Pesawaran juga mempunyai beberapa gunung yaitu Gunung Ratai di Kecamatan Padang Cermin dan yang tertinggi adalah Gunung Pesawaran di Kecamatan Kedondong dengan ketinggian 1.662 m. Sungai terpanjang di Kabupaten Pesawaran adalah Way Semah, dengan panjang 54 km dan daerah aliran seluas 135,0 km². Sedangkan aliran sungai-sungai kecil diantaranya Way Penengahan, Way Kedondong, Way Kuripan, Way Tahala, Way Tabak, Way Awi, Way Padang Ratu, Way Ratai, dan lain-lain.

Secara administratif Kabupaten Pesawaran terbagi dalam sembilan kecamatan, adalah Kecamatan Padang Cermin, Punduh Pidada, Kedondong, Way Lima, Gedong Tataan, Negeri Katon dan Kecamatan Tegineneng, Marga Punduh dan Way Khilau. Pada tahun 2007 hingga sekarang, jumlah kecamatan di Kabupaten Pesawaran telah mengalami perubahan akibat adanya pemekaran dengan ketambahan 4 kecamatan sehingga total menjadi 11 kecamatan yaitu : Padang Cermin, Punduh Pidada, Kedondong, Way Lima, Gedong Tataan, Negeri Katon, Tegineneng, Marga Punduh, Way Khilau, Way Ratai, Teluk Pandan.

B. Demografi

Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Kabupaten Pesawaran sementara adalah 397.294 jiwa, yang terdiri atas 204.934 laki-laki dan 192.360 perempuan. Dari hasil Sensus Penduduk Tahun 2000

(SP2010) tersebut masih tampak bahwa penyebaran penduduk Kabupaten Pesawaran masih bertumpu di Kecamatan Padang Cermin yakni sebesar 22,16 persen, kemudian diikuti oleh Kecamatan Gedong Tataan sebesar 21,57 persen. Kecamatan Punduh Pidada adalah kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil yaitu 25.919 jiwa. Sedangkan Kecamatan Padang Cermin dan Kecamatan Gedong Tataan merupakan kecamatan yang paling banyak penduduknya yakni masing-masing sebanyak 88.057 jiwa dan 85.696 jiwa.

Luas wilayah Kabupaten Pesawaran sekitar 1.173,77 km² yang didiami oleh 397.294 jiwa maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Pesawaran adalah sebanyak 338 jiwa/km². Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Gedong Tataan yakni sebanyak 882 jiwa/km² sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan Punduh Pidada yakni sebanyak 115 jiwa/km². Sex ratio penduduk Pesawaran adalah sebesar 106, yang artinya jumlah penduduk laki-laki 6 persen lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan, atau setiap 100 perempuan terdapat 106 laki-laki. Sex ratio terbesar terdapat di Kecamatan Punduh Pidada yaitu sebesar 111. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pesawaran per tahun selama sepuluh tahun terakhir yakni dari tahun 2000-2010 sebesar 1,29 persen. Laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Padang Cermin adalah yang tertinggi dibandingkan Kecamatan lain di Kabupaten Pesawaran yakni sebesar 1,82 persen, sedangkan yang terendah di Kecamatan Punduh Pidada yakni sebesar 0,74 persen.

Kecamatan Gedong Tataan menempati urutan kedua terbesar laju pertumbuhan penduduknya yaitu sebesar 1,78 persen meskipun kecamatan tersebut merupakan ibukota dari Kabupaten Pesawaran. Berdasarkan jumlah tersebut, sebagian besar memeluk agama Islam 97,161%, kemudian menyusul berturut-turut agama Hindu 0,100%, agama Protestan 0,77%, kepercayaan lainnya 0,79%, agama Katolik 0,71%, dan agama Budha 0,46%. Dalam masyarakat Kabupaten Pesawaran, kehidupan umat beragama berjalan dengan baik di mana toleransi dan sikap menghargai sangat tinggi. Masyarakat Kabupaten Pesawaran yang sebagian beragama Islam sebanyak 380.028 jiwa dapat berdampingan dengan umat beragama lainnya, yaitu umat Katolik, Protestan, Hindu dan Budha.

C. Tahap-tahap Penanggulangan Bencana

Pemerintah Kabupaten Pesawaran melakukan kegiatan koordinasi penanggulangan berbagai macam bencana baik itu bencana alam ataupun bencana non-alam (akibat ulah manusia). Di dalam penanggulangan bencana, pemerintah kabupaten telah menetapkan macam-macam bentuk tahapan kegiatan, yaitu :

1. Prediksi (prediction) adalah kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan melalui langkah-langkah struktural dan non-struktural. Langkah struktural yaitu langkah yang dilakukan untuk mengurangi dampak buruk dari bencana alam, kerusakan lingkungan dan bencana teknologi. Sedangkan langkah non-struktural yaitu tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran pada saat awal terjadi bencana untuk memastikan respon yang efektif terhadap dampak bahaya, termasuk peringatan dini yang efektif dan tepat waktu, serta evakuasi sementara penduduk dan barang dari lokasi terancam bencana.
2. Peringatan dini (early warning) adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
3. Bantuan darurat (emergency relief) adalah bantuan cepat berupa kebutuhan dasar seperti bahan makanan, pakaian dan obat-obatan.
4. Rehabilitasi (rehabilitation) adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
5. Rekonstruksi (reconstruction) adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam dengan para informan. Peneliti menggunakan sampel purposif (*purposive sampling*) yang didasarkan pada kemampuan informan menggambarkan secara jelas mengenai strategi yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam penanggulangan bencana alam tahun 2017. Berdasarkan hal tersebut diatas maka informan yang dipilih peneliti yaitu :

1. Pemerintah Kabupaten Pesawaran yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
2. Pemerintah Kecamatan yang terdiri dari 11 Kecamatan di Kabupaten Pesawaran.
3. Warga Masyarakat yang berada di 11 Kecamatan di Kabupaten Pesawaran.

B. Strategi Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam Penanggulangan Bencana Tahun 2017.

Pada bab ini penulis akan mendeskripsikan bagaimana rencana strategi yang digunakan Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam penanggulangan bencana. Strategi tersebut menyangkut pola yang diterapkan pemerintah kabupaten dalam penanggulangan bencana yang terjadi di masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, strategi yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam menanggulangi bencana tahun 2017 adalah memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana alam, selalu meberikan sosialisasi kepada masyarakat ketika sudah masuk berganti musim, memberikan peringatan dini kepada masyarakat ketika bencana akan datang dan memberikan bantuan recovery terhadap

lingkungan dan tempat tinggal mereka yang terkena dampak akibat bencana tersebut. Berdasarkan tahapan-tahapan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran tahun 2017 maka peneliti melakukan wawancara terhadap 4 (empat) tahapan dalam penanggulangan bencana tersebut yaitu,

1. **Prediksi (*prediction*)** : dalam fase ini, dilakukan kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan melalui langkah-langkah struktural dan non-struktural. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada BPBD kabupaten Pesawaran yang diwakili oleh Bapak Jamaludin selaku kepala bidang logistik dan bencana BPBD Kabupaten Pesawaran iya mengatakan bahwa :

“Di dalam sosialisasi memberikan peringatan dini, biasanya tidak ada kegiatan khusus, yang dilakukan hanya berupa pemberian informasi tentang tata cara menanggulangi bencana, serta kiat-kiat yang dilakukan apabila menghadapi bencana alam “ (Wawancara tanggal 5 Juni 2017)

Hal yang sama di jelaskan oleh Camat Padang Cermin Bapak Darsoyo yang mengatakan bahwa :

“Tidak ada kegiatan khusus untuk pemberian peringatan dini. Karena petugas BPBD sendiri ada yang tidak mengerti sistem penanggulangan bencana” (Wawancara Tanggal 6 Juni 2017)

Camat Kedondong Marzuki, S.Sos mengatakan bahwa :

“ Bencana yang terjadi di wilayah kami Kecamatan Kedondong sendiri tidak bisa di prediksi, sehingga BPBD tidak setiap waktu memberikan peringatan saat-saat awal terjadi bencana.” (Wawancara Tanggal 7 Juni 2017)

Menurut hasil wawancara tersebut di atas maka peneliti melihat tidak ada kegiatan khusus dalam memberikan peringatan dini ke masyarakat apabila terjadi bencana. Kurangnya pengetahuan yang menyangkut tentang penanggulangan tersebutlah yang menyebabkan Pemerintah Kabupaten Pesawaran kekurangan tenaga yang berkualitas dibidang penanggulangan bencana untuk menyampaikan peringatan dini, serta kurangnya pendidikan

kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Di dalam fase prediksi ini seharusnya pemerintah kabupaten melakukan kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan melalui langkah-langkah struktural dan non-struktural, misalnya langkah yang dilakukan untuk mengurangi dampak buruk dari bencana bencana, sehingga masyarakat bisa mempersiapkan langkah yang harus diambil dalam menghadapi bencana. Sedangkan langkah non-struktural yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran adalah berupa tindakan pada saat awal terjadinya bencana untuk memastikan respon yang efektif terhadap dampak bahaya bencana. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten sendiri kurang memerhatikan soal kegiatan pemberian peringatan dini dan terkesan kurang memprioritaskan masyarakat yang mengalami bencana. Padahal salah satu kegiatan dari strategi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama dalam menyampaikan informasi tentang menghadapi bencana, sehingga diharapkan dalam menyampaikan informasi dapat memberikan kesiapan bagi semua pihak dalam menghadapi kemungkinan situasi bencana di masa yang akan datang.

Pemerintah Kabupaten Pesawaran dituntut untuk memberikan informasi kepada masyarakat dalam menanggulangi bencana. Menurut Kabid logistik dan bencana BPBD Pesawaran menjelaskan bahwa :

“BPBD memberikan informasi tentang tata cara menanggulangi bencana, serta kiat-kiat yang dilakukan apabila menghadapi bencana saat meninjau ke lokasi bencana.” (Wawancara Tanggal 5 Juni 2017)

Menurut Desti warga Teluk Pandan iya mengatakan bahwa :

“Saat memberikan bantuan ke masyarakat yang mengalami bencana, petugas BPBD memberikan informasi tentang cara menggunakan fasilitas tanggap bencana diberikan oleh BPBD, misalnya petugas BPBD sendiri yang langsung mensosialisasikan ke masyarakat.” (Wawancara 6 Juni 2017)

Selain itu Bapak Yuliardi, S.STP selaku Camat Teluk Pandan mengatakan

bahwa :

“Masyarakat lebih memahami kondisi fisik dan BPBD hanya mengarahkan kiat-kiat apa saja yang dilakukan apabila bencana tiba dan bagaimana menghadapi bencana tersebut..” (Wawancara 6 Juni 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pemberian peringatan dini adalah berupa pemberian informasi tata cara menanggulangi bencana yang disertai dengan kiat-kiat yang dilakukan apabila terjadi bencana di lingkungannya. Cara pemberian informasi ini merupakan pendukung dalam pelaksanaan strategi Pemerintah Kabupaten Pesawaran, pada pemberian informasi tata cara menanggulangi bencana berisikan pesan tentang cara yang dilakukan pada saat bencana, serta cara mengurangi dampak bencana. Sedangkan pemberian kiat-kiat yang dilakukan apabila terjadi bencana berisikan tentang apa yang harus dilakukan sebelum atau pada saat bencana.

Informasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran masih sesuai dengan standarisasi dari pusat. Kegiatan ini sangat penting, karena dapat meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat dalam mempersiapkan atau secara tidak langsung akan meminimalisir dampak dari bencana, dengan adanya kegiatan ini pemerintah kabupaten bisa melindungi masyarakat terhadap ancaman bencana yang terjadi. Sehingga Pemerintah Kabupaten Pesawaran dapat bertanggungjawab besar dalam kegiatan pencegahan bencana mulai dari kegiatan pencegahan seperti ini bisa dijadikan sebagai lembaga yang berdaya guna dan berhasil guna dalam penanggulangan bencana yang terjadi di Kabupaten Pesawaran. Karena melalui tahap ini diharapkan masyarakat khususnya di Kabupaten Pesawaran bisa mendapatkan informasi yang diharapkan terkait bagaimana cara menghadapi bencana, dan seharusnya pemerintah setempat lebih memerhatikan kinerja daripada sumber daya manusianya agar tidak ada lagi hambatan dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang mengalami bencana.

Di dalam fase ini prediksi ini, dilakukan kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan melalui langkah- langkah struktural dan non-struktural. Langkah struktural yaitu langkah yang dilakukan untuk mengurangi dampak buruk dari bencana alam, kerusakan lingkungan dan bencana teknologi. Sedangkan langkah non-struktural yaitu tindakan yang diambil pada saat awal terjadi bencana untuk memastikan respon yang efektif terhadap dampak bahaya, termasuk peringatan dini yang efektif dan tepat waktu, serta evakuasi sementara penduduk dan barang dari lokasi terancam bencana. Di dalam melaksanakan suatu kegiatan, terlebih dahulu harus memiliki suatu prediksi.

Prediksi merupakan perkiraan, prediksi cuaca selalu berdasarkan data dan informasi terbaru yang didasarkan pengamatan. Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa langkah pertama yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pesawaran adalah pemberian peringatan dini dalam menghadapi bencana, serta kiat-kiat yang dilakukan apabila menghadapi bencana. Untuk Kabupaten Pesawaran daerah rawan bencana yaitu, Kecamatan Teluk Pandan, Kecamatan Way Khilau dan Juga Kecamatan Kedondong.

- 2. Peringatan (*warning*)** : fase ini mengacu pada penyediaan informasi yang efektif dan tepat waktu melalui lembaga-lembaga yang terpercaya, agar individu dapat mengambil tindakan untuk menghindari atau mengurangi resiko dan mempersiapkan respon yang efektif.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Jamaludin Kabid logistik dan bencana BPBD Kabupaten Pesawaran tentang bagaimana pemerintah daerah merespon keluhan masyarakat tentang bantuan bencana ia mengatakan bahwa :

“Masyarakat yang mengalami bencana, dan meminta bantuan bencana biasanya berkoordinasi langsung ke desa, kemudian pihak desa menghubungi pemerintah daerah dalam hal ini BPBD, dan BPBD mendata wilayah-wilayah yang mengalami bencana tersebut.” (hasil wawancara tanggal 5 Juni 2017)

Menurut Camat Punduh Pidada Bapak Drs. A. Thamrin mengatakan bahwa :

“Sesuai prosedur yang sudah ada, pemerintah kabupaten mendistribusikan bantuan ke wilayah yang mengalami bencana setelah menerima laporan dan mendata semua wilayah yang mengalami bencana dan wilayah yang terkena bencana.” (Wawancara 6 Juni 2017)

Pernyataan di atas diaminikan oleh Sekcam Way Lima Bapak Anwar, S.H yang mengatakan bahwa :

“Didalam merespon masyarakat, pemerintah kabupaten biasanya mendata wilayah-wilayah yang sudah melapor terlebih dahulu, kemudian pemerintah kabupaten melalui BPBD sesegera mungkin mengirim/mendistribusikan air ke wilayah tersebut.” (Wawancara 7 Juni 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah kabupaten merespon keluhan masyarakat yang membutuhkan bantuan bencana melalui pihak desa, sehingga masyarakat yang membutuhkan bantuan bencana dapat berkoordinasi dengan pihak desa, kemudian pemerintah kabupaten mendata dan mendistribusikan bantuan ke wilayah yang mengalami bencana. Dengan adanya koordinasi yang terstruktur, sangat membantu pihak pemerintah kabupaten maupun pihak masyarakat tanpa terkecuali. Dengan adanya kemudahan masyarakat untuk mengurangi dampak dari bencana, masyarakat juga bisa mengambil tindakan untuk menghindari atau mengurangi resiko dan mempersiapkan respon yang efektif.

Pada proses tahapan ini juga sudah dimulai untuk mengantisipasi bencana yang akan datang. Perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis resiko bencana dan upaya penanggulangannya yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya. Berdasarkan hasil penelitian ini, jawaban dari informan formal dan informan pendukung sangat sinkron dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Pesawaran sudah melakukan tugasnya untuk melayani masyarakat yang mengalami bencana dengan baik dan benar, dalam merespon setiap keluhan

dari masyarakat, serta pengambilan tindakan setelah mendapatkan laporan yang sangat diperlukan untuk mengurangi resiko bencana tersebut.

Pada prosesnya pemerintah kabupaten sudah melakukan pelayanan pada waktu yang tepat ketika terjadi bencana. Menurut bapak Jamaludin selaku Kabid logistik dan bencana BPBD Kabupaten Pesawaran mengatakan bahwa :

“Pemerintah kabupaten melalui BPBD sebisa mungkin memberikan pelayanan pada waktu yang tepat, sesegera mungkin mengirim/mendistribusikan bantuan ke wilayah tersebut” (Wawancara 5 Juni 2017).

Menurut Camat Punduh Pidada Bapak Drs. A. Thamrin mengatakan bahwa :

“Menurut saya pemerintah kabupaten sudah berusaha membantu masyarakat yang mengalami bencana dengan secepat mungkin, akan tetapi tentu saja dalam melakukan pelayanan pasti mengalami kendala misalnya sarana dan prasarana yang terbatas” (Wawancara 7 Juni 2017).

Pernyataan di atas dijamin oleh Sekcam Way Lima Bapak Anwar, S.H yang mengatakan bahwa :

“Secepat dan sesegera mungkin pemerintah kabupaten memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti bahan makanan, pakaian serta obat-obatan.” (Wawancara Tanggal 6 Juni 2017)

Menurut hasil wawancara, pemerintah kabupaten melakukan pelayanan secepat mungkin ketika warga mengalami bencana, namun pemerintah memiliki kendala dalam melakukan pelayanan karena fasilitas yang kurang memadai, s. Karena dalam memberi pelayanan kepada masyarakat merupakan kegiatan penanggulangan bencana, kegiatan ini juga penting karena semua rangkaian kegiatan didalamnya memiliki hubungan atau kolerasi bagi kegiatan pelaksanaan penanggulangan bencana. Dengan adanya kegiatan ini maka secara tidak langsung akan meminimalisir, mengurangi, dan memerkecil dampak atau akibat suatu bencana.. Mengacu dalam UN/ISDR (2002) dalam fase ini, peran Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui BPBD Kabupaten

Pesawaran adalah sebagai lembaga yang terpercaya untuk memberikan informasi dan melayani masyarakat agar masyarakat mampu mengurangi resiko dari bencana dan mempersiapkan respon yang efektif dari bencana tersebut. Kemudian salah satu dari langkah strategi ini dapat mempermudah BPBD dalam merealisasikan kegiatan strategi yang berikutnya. Dengan adanya keselarasan antara hasil observasi dan penelitian menunjukkan bahwa BPBD sudah berusaha menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi dari bencana yang terjadi, walaupun BPBD masih mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat (BNPB).

Langkah selanjutnya adalah peringatan (*warning*), fase ini mengacu pada penyediaan informasi yang efektif dan tepat waktu melalui lembaga-lembaga yang terpercaya, agar individu dapat mengambil tindakan untuk menghindari atau mengurangi resiko dan mempersiapkan respon yang efektif. Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam strategi adalah ketersediaan dana dan fasilitas yang dimiliki lembaga. Pertimbangan dana memang dalam banyak hal menjadi yang paling utama, karena suatu kegiatan, bagaimanapun juga pasti membutuhkan biaya tertentu. Demikian pula fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan program prediksi. Maksudnya, dalam hal ini adalah kemudahan-kemudahan dan perangkat sistem yang diperlukan untuk kegiatan yang dimaksud. Pelaksanaan strategi Pemerintah Kabupaten Pesawaran tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan fasilitas, media dan anggaran dana yang memadai.

- 3. Bantuan darurat (*emergency relief*)** : pemberian bantuan atau pertolongan selama atau segera setelah bencana terjadi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan yang mendasar orang-orang yang terkena. Hal ini dapat langsung dalam jangka pendek atau jangka panjang.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Jamaludin Kabid logistik dan bencana BPBD Kabupaten Pesawaran tentang bagaimana pemerintah daerah memberikan bantuan dalam menanggulangi bencana, apakah sudah sesuai

dengan kebutuhan masyarakat serta sasaran penerima bantuan tersebut ia mengatakan bahwa :

“Biasanya pemerintah kabupaten mengadakan peninjauan langsung ke wilayah-wilayah yang mengalami bencana, kemudian pemerintah kabupaten yang diwakili oleh BPBD mendistribusikan bantuan ke wilayah tersebut. Sasaran BPBD yang paling mendasar adalah masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di daerah terkena dampak bencana . Setelah melakukan peninjauan langsung ke wilayah, harapannya ialah masyarakat tidak mengalami kesulitan dari dampak terkena bencana tersebut”. (hasil wawancara tanggal 5 Juni 2017)

Menurut Camat Way Ratai Pidada Bapak Solhan Khairi, S.Pd mengatakan bahwa :

“Cara kami memberikan bantuan kepada masyarakat adalah dengan mengadakan peninjauan ke wilayah yang memang sangat mengalami bencana, dan kami coba memberikan bantuan dengan mendistribusikan ke wilayah tersebut. Tentu saja sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat, terutama yang tinggal di daerah rawan bencana. Harapannya masyarakat tidak lagi dapat terbantu dengan bantuan yang kemungkinan tidak bisa menyukupi kebutuhan hidup masyarakat yang terkena bencana.” (Wawancara 6 Juni 2017)

Pernyataan di atas diaminkan oleh Camat Gedong Tatan Bapak Mohamad Iqbal, M.M yang mengatakan bahwa :

“Pemerintah Kabupaten meninjau langsung lokasi yang mengalami bencana, kemudian pemerintah kabupaten mendistribusikan bantuan ke wilayah tersebut, apabila diperlukan . Sasaran dari hasil kegiatan ini tentunya masyarakat, harapannya adalah masyarakat dapat tertolong dengan adanya kegiatan pemberian bantuan ini walaupun bantuan yang diberikan belum terlalu besar nominalnya.” (Wawancara 7 Juni 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah kabupaten memberikan bantuan ke wilayah yang mengalami bencana dengan cara meninjau langsung ke lokasi, kemudian pemerintah kabupaten membagikan bantuan ke wilayah-wilayah yang membutuhkan, sesuai dengan data yang diperoleh dari laporan masing-masing wilayah. Sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat, terutama yang tinggal di daerah rawan bencana. Harapannya masyarakat terbantu dengan adanya bantuan ini. Pemberian bantuan atau pertolongan setelah bencana terjadi dapat memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan yang mendasar Pihak BPBD juga mengungkapkan bahwa

tindakan penanggulangan yang dilakukan disesuaikan berdasarkan kondisi daerah masing-masing agar bantuan tersebut dapat bermanfaat langsung bagi masyarakat yang terkena dampak bencana tersebut.

Langkah selanjutnya adalah bantuan darurat dalam melaksanakan rencana strategi yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam fase ini, pemberian bantuan atau pertolongan selama atau segera setelah bencana terjadi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan yang mendasar orang-orang yang terkena. Hal ini dapat langsung dalam jangka pendek atau jangka panjang.

Pelaksanaan kegiatan ini, pemerintah kabupaten mengadakan peninjauan langsung ke wilayah- wilayah yang mengalami bencana, kemudian pemerintah kabupaten mendistribusikan bantuan ke wilayah tersebut. Kegiatan ini sangatlah bermanfaat bagi semua pihak tidak terkecuali masyarakat, karena melalui kegiatan ini masyarakat bisa meminimalisir atau mengurangi resiko yang terjadi akibat bencana. Karena di dalam mengatasi bencana yang terus-menerus seperti ini, tidak hanya pemerintah yang dituntut untuk bertanggungjawab dalam menanggulangnya, akan tetapi faktor dari masyarakat juga. Selain itu, karena setiap kecamatan mempunyai karakteristik ancaman dan resiko yang berbeda- beda, sehingga perlu disusun suatu rencana di tingkat wilayah/daerah masing- masing agar penanggulangan bencana dapat dilakukan lebih efektif dan lebih terarah.

4. Rehabilitasi (rehabilitation) : fase ini mencakup keputusan dan tindakan yang diambil setelah bencana dengan tujuan untuk memulihkan atau memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat serta mendorong dan memfasilitasi penyesuaian yang diperlukan untuk mengurangi resiko bencana.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Jamaludin Kabid logistik dan bencana BPBD Kabupaten Pesawaran tentang apakah pemerintah daerah sudah memfasilitasi masyarakat untuk memperbaiki kehidupannya setelah terkena bencana dan seperti apakah fasilitas atau bantuan bencana yang diberikan pemda kepada masyarakat yang terkena bencana tersebut ia mengatakan bahwa

:

“Dalam memfasilitasi masyarakat yang terkena bencana, pemerintah kabupaten sudah mendistribusikan bantuan kepada masyarakat seperti bahan makanan beras, mie instan, obat-obatan dan pakaian layak pakaidengan mengoordinasi terlebih dahulu kepada masyarakat termasuk pihak desa”. (hasil wawancara tanggal 5 Juni 2017)

Menurut Camat Teluk Pandan Bapak Yuliardi, S.STP mengatakan bahwa :

“Biasanya pemerintah kabupaten mengadakan rapat internal guna mengadakan konsultasi pada masing-masing bidang yang mengacu pada Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) dalam penanggulangan bencana selanjutnya BPBD Kabupaten Pesawaran selaku leading sector dalam penanggulangan bencana mengadakan rapat koordinasi dengan satuan kerja lembaga terkait dengan penanggulangan bencana guna mendistribusikan bantuan ke wilayah yang terkena dampak bencana.” (Wawancara 6 Juni 2017)

Pernyataan di atas diaminkan oleh Camat Tegineneng Bapak Syahrudin, S.Pd yang mengatakan bahwa :

“Seperti yang sudah saya utarakan, pemerintah kabupaten memfasilitasi masyarakat yang mengalami bencana dengan cara mendistribusikan bantuan guna untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, namun dalam pelaksanaannya memang kami masih dibantu dari pusat (BNPB) karena kurangnya fasilitas yang memadai dan juga kurangnya anggaran dalam penanggulangan bencana seperti mobil armada penyuplay air” (Wawancara 7 Juni 2017)

Menurut hasil wawancara dengan informan, pemerintah kabupaten sudah memfasilitasi masyarakat yang mengalami bencana, mencakup pemulihan kondisi kehidupan masyarakat serta mendorong dan memfasilitasi penyesuaian yang diperlukan, misalnya mengurangi resiko bencana dengan memberikan peringatan dan himbauan dalam pergantian cuaca Namun karena kurangnya fasilitas yang memadai dan dana penanggulangan bencana terbatas maka dalam memberikan bantuan sering tidak terjadi ketidakpuasan antara masyarakat. , pemerintah kabupaten dalam hal ini diwakili oleh BPBD Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan kegiatannya masih dibantu dari pusat (BNPB) karena BPBD Kota Bandar Lampung masih terbilang lembaga yang baru. Sebenarnya anggaran dana dan sarana masih dibbilang belum cukup memadai,

tetapi setidaknya anggaran tersebut sudah cukup mendukung kegiatan yang dilakukan oleh BPBD Kota Bandar Lampung.

Fase rehabilitasi ini mencakup keputusan dan tindakan yang diambil setelah bencana dengan tujuan untuk memulihkan atau memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat serta mendorong dan memfasilitasi penyesuaian yang diperlukan untuk mengurangi resiko bencana. Dalam melaksanakan kegiatan ini, pemerintah kabupaten mengadakan rapat internal guna mengadakan konsultasi pada masing-masing bidang yang mengacu pada Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) yaitu BPBD Kabupaten Pesawaran, selanjutnya BPBD mengadakan rapat koordinasi dengan satuan kerja lembaga terkait dengan penanggulangan bencana guna memasang sumur bor ke wilayah yang mengalami bencana, jadwal pemasangannya, siapa saja pihak yang ikut terlibat, serta pemilihan tempat dan anggaran dana yang akan dikeluarkan, namun dalam pelaksanaan kegiatan nya BPBD Kabupaten Pesawaran masih dibantu oleh BNPB Nasional karena terbatasnya dana penanggylangan bencana.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan, BPBD Kabupaten Pesawaran hanya bertanggungjawab pada pelaksanaan kegiatan di lingkungan kabupaten saja. Artinya untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya atau kegiatan di kabupaten/provinsi telah menjadi tanggungjawab dari BPBD masing-masing kabupaten/provinsi. Hubungan kerja antara BPBD kabupaten. dengan BPBD Kabupaten/Provinsi bersifat memfasilitasi/koordinasi dan pada saat penanganan darurat bencana BPBD Kota cepat melaksanakan komando, koordinasi, dan pelaksana (Pasal 30, PP No 46 Tahun 2008).

- 5. Rekonstruksi (*reconstruction*)** : fase ini mencakup semua kegiatan yang penting dilakukan dalam jangka panjang yaitu fase prediksi berupa mitigasi dan kesiapsiagaan, fase respon terhadap peringatan dan pemberian bantuan darurat, serta fase pemulihan berupa rehabilitasi dan rekonstruksi

Berdasarkan hasil wawancara oleh Jamaludin Kabid logistik dan bencana BPBD Kabupaten Pesawaran tentang apakah strategi BPBD dalam menanggulangi bencana jangka panjang, program apa saja dari pemerintah kabupaten yang mengalami bencana serta hambatan apa yang dialami pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana tersebut ia mengatakan bahwa :

“Strategi yang dilakukan pemerintah kabupaten dalam menanggulangi bencana adalah mengkonsultasikan permasalahan bencana tersebut ke masing-masing satuan terkait, selain itu kami juga memberikan pemahaman kepada warga untuk tidak membuang sampah sembarangan serta menghimbau kepada warga masyarakat untuk selalu siaga ketika pergantian musim akan tiba. Hambatan yang dialami oleh pemerintah kabupaten adalah dengan anggaran yang sangat terbatas kadang bantuan yang kami berikan belum optimal untuk warga karena anggaran penanggulangan bencana terbatas disesuaikan dengan kondisi APBD tahun ini ”. (hasil wawancara tanggal 5 Juni 2017)

Menurut Camat Marga Punduh Bapak Edy Sutrisno, S.P mengatakan bahwa :

“Strategi yang pemerintah kabupaten lakukan adalah dengan cara memberkan sosialisasi kepada masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana untuk melakukan kesiapsiagaan ketika bencana akan datang. Hambatan yang dialami oleh kami selaku pemerintah kabupaten adalah dana, sarana dan prasarana yang terbatas, serta kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas.” (Wawancara 6 Juni 2017)

Pernyataan di atas diaminikan oleh Camat Negeri Katon Bapak Rohayat, S.STP yang mengatakan bahwa :

“ Kiat-kiat kami dalam menanggulangi bencana adalah dengan melakukan gotong royong mebersihkan lingkungan karena dengan begitu potensi bencana alam seperti bancir dalam diminimalisasi kedatangannya serta selalu memberikan pengertian ke warga agar jangan membuang sampah sembarangan. Selain itu diberikan pengetahuan tentang tata cara evakuasi ketika bencana alam tiba. Hambatan yang dialami BPBD sendiri dalam menanggulangi bencana adalah personel yang begitu cepat di dalam sistem kerja pemerintah, sehingga perlunya penyesuaian kerja kembali apabila terjadi perubahan personel atau bidang kerja. Selain itu anggaran yang bisa

dikatakan kurang, jujur kami masih memperoleh bantuan dari pemerintah pusat (BNPB) dan pemerintah daerah (APBD)” (Wawancara 7 Juni 2017)

Berdasarkan hasil penelitian, harapan BPBD dimasa yang akan datang dengan dilaksanakannya kegiatan strategi tersebut adalah terwujudnya lingkungan yang bebas ancaman bencana, yang didukung oleh adanya sistem informasi kesiagaan dan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat melalui strategi penanggulangan bencana, serta terciptanya koordinasi yang baik dan sepaham dengan pihak atau instansi terkait sehingga penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan standarnya, selain itu perubahan personel yang begitu cepat di dalam sistem kerja pemerintah.

Pada fase ini mencakup semua kegiatan penting yang dilakukan dalam jangka panjang yaitu fase prediksi berupa mitigasi dan kesiapsiagaan, fase respon terhadap peringatan dan pemberian bantuan darurat oleh pihak pemerintah kabupaten, serta fase pemulihan berupa rehabilitasi dan rekonstruksi. Dari hasil observasi menunjukkan bahwa strategi yang akan dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran adalah sosialisasi tentang menjaga lingkungan dengan baik, hal ini menjelaskan bahwa lingkungan akan bersih dan bencana alam seperti banjir akan berkurang dampaknya karena kesiapsiagaan masyarakat dalam menjaga lingkungannya agar dampak bencana yang terjadi tidak begitu besar.

Langkah terakhir dalam mengidentifikasi strategi Pemerintah Kabupaten Pesawaran adalah rekonstruksi atau evaluasi dari kegiatan yang telah dilakukan, fase ini mencakup semua kegiatan yang penting dilakukan dalam jangka panjang yaitu fase prediksi berupa mitigasi dan kesiapsiagaan, fase respon terhadap peringatan dan pemberian bantuan darurat, serta fase pemulihan berupa rehabilitasi dan rekonstruksi.

Tujuan utama fungsi dari evaluasi ini adalah agar pelaksanaan keguatan itu sesuai dengan standarnya. Evaluasi ini merupakan proses untuk

membandingkan antara pelaksanaan kegiatan dan standarnya, mengidentifikasi dan mengadakan analisis terhadap kemungkinan yang terjadi. Dengan kata lain, dari hasil evaluasi tersebut dapat diketahui hasil, masalah, dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Setelah itu dapat ditentukan, apakah strategi tersebut dapat dilanjutkan atau tidak.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya tentang Strategi Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam Penanggulangan Bencana, maka peneliti memberikan simpulan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Pesawaran memiliki sejumlah daerah yang berpotensi terjadinya bencana hal ini diperoleh dari hasil penelusuran pemerintah daerah setempat serta BPBD Kabupaten Pesawaran saat peninjauan di lapangan serta laporan dari setiap kecamatan. BPBD Kabupaten Pesawaran masih merupakan lembaga baru, sehingga dalam hal penyediaan sarana dan anggaran masih sangat terbatas terutama anggaran dalam penanggulangan bencana sehingga perlu adanya kerjasama antara pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat dalam hal penanggulangan bencana.
2. Pemberian bantuan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran, adalah tindakan penanggulangan yang dilakukan disesuaikan berdasarkan kondisi daerah masing-masing. Kabupaten Pesawaran yang memiliki wilayah dataran tinggi dan dataran rendah yang memiliki wilayah garis pantai yang luas memiliki potensi bencana alam yang begitu besar seperti, banjir, tanah longsor dan pengikisan oleh air laut. Oleh karena itu diperlukan penanganan yang berbeda di setiap kecamatan yang terkenda dampak bencana yang disesuaikan dengan kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
3. Rehabilitasi merupakan tindakan yang diambil setelah bencana oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui BPBD Kabupaten Pesawaran, dalam fase ini BPBD Kabupaten Pesawaran akan membagikan bantuan baik itu berupa makanan, pakaian dan juga obat-obatan serta melakukan perbaikan infrastruktur yang rusak serta merehabilitasi atau meberikan bantuan kepada

masyarakat yang rumahnya terkena dampak dari bencana tersebut. Selain itu pemerintah daerah juga dituntut untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat selalu waspada karena bencana dapat datang kapanpun dan dimanapun berada. Kegiatan ini juga sangat penting untuk mengantisipasi dampak dari bencana ketika bencana tersebut melanda Kabupaten Pesawaran.

4. Dalam fase rekonstruksi ini, biasanya Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui BPBD Kabupaten Pesawaran mengadakan rapat koordinasi dengan BPBD kabupaten/provinsi yang diadakan paling sedikit satu kali dalam satu tahun. Kegiatan rapat ini bertujuan untuk mengetahui hasil evaluasi kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana yang dilakukan BPBD kabupaten/provinsi ke masyarakat, sehingga dari hasil rapat tersebut dapat diketahui kegiatan apa saja yang telah dilakukan pada masing-masing BPBD kabupaten/provinsi, apakah strategi yang sudah dilakukan sesuai atau belum, apa hambatan dan masalah yang ditemui, dan sebagainya.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka peneliti memberikan saran yaitu :

1. Melalui hasil penelitian ini diharapkan pemerintah mampu membantu melalui berbagai program. Masukan program atau kebijakan dari pemerintah tersebut merupakan salah satu bagian dari faktor eksternal yang turut memengaruhi penduduk dalam mengatasi bencana. Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam hal ini BPBD Kabupaten Pesawaran mampu melaksanakan rencana strategi dengan memusatkan perhatian pada pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas dari lembaga BPBD sendiri, misalnya meningkatkan keterampilan dalam proses sosialisasi penanggulangan bencana. Di sini terlihat bahwa program dan kegiatan yang ada di BPBD Kabupaten Pesawaran yaitu pendidikan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana kurang ditingkatkan. Kemudian beberapa hal yang harus diperhatikan oleh BPBD Kabupaten Pesawaran, BPBD harus mengetahui dengan jelas kondisi fisik dari setiap wilayah atau Kecamatan itu sendiri agar dalam proses penanggulangan bencana dapat tepat sasaran.

2. Untuk penelitian selanjutnya peneliti memberikan saran yaitu, penelitian yang berfokus pada dampak dari rencana strategi, baik dampak positif maupun negatif terhadap masyarakat dan lingkungannya. Penelitian ini penting karena dapat memberikan masukan untuk perumusan solusi penanganan dari dampak bencana kekeringan yang memiliki dampak positif yang optimal dan dampak negatif yang minimal. Selain itu penelitian yang berfokus pada rencana strategi terhadap perubahan iklim secara komprehensif. Maksudnya adalah tidak hanya berfokus pada salah satu dampak perubahan iklim yakni kekeringan seperti pada penelitian ini. Hal ini penting untuk membantu dalam perumusan kebijakan atau program penanganan perubahan iklim secara menyeluruh.

BAB VI. JADWAL PELAKSANAAN

Penelitian ini direncanakan selama tiga bulan dalam tahun 2017. untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

NO	Kegiatan	Waktu											
		Bulan 1				Bulan II				Bulan III			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Konolidasi Tim Peneliti												
2	Kajian Literatur												
3	Penyusunan Laporan Awal												
4	Wawancara												
5	Reduksi Data												
6	Klasifikasi Data												
7	Analisis dan Pengolahan Data												
8	Penyusunan Laporan Penelitian												
9	Sosialisasi Hasil Penlitian												

BAB VII. PERSONALIA PENELITIAN

1. Ketua Peneliti

- a. Nama : Drs. Piping Setia Priangga, M.Si.
- b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- c. NIP : 195812041986081001
- d. Disipin Ilmu : Ilmu Pemerintahan/Politik
- e. Pangkat/Golongan : Penata /III c
- f. Jabatan Fungsional/ Struktural: Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan UNILA
- g. Fakultas/Jurusan : FISIP/Ilmu Pemerintahan
- h. Waktu Penelitian : 15 jam/minggu

2. Anggota I

- a. Nama : Dr. Feni Rosalia, M.Si.
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. NIP : 19690219 199403 2 001
- d. Disipin Ilmu : Ilmu Pemerintahan/Politik
- e. Pangkat/Golongan : Pembina /IV a
- f. Jabatan Fungsional/ Struktural: Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan UNILA
- g. Fakultas/Jurusan : FISIP/Ilmu Pemerintahan
- h. Waktu Penelitian : 15 jam/minggu

3. Anggota II

- a. Nama : Drs. Aman Toto Dwijono, M. H.
- b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- c. NIP : 19570728 198703 1 006
- d. Disipin Ilmu : Ilmu Pemerintahan/Politik
- e. Pangkat/Golongan : Penata Tk 1 /III d
- f. Jabatan Fungsional/ Struktural: Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan UNILA
- g. Fakultas/Jurusan : FISIP/Ilmu Pemerintahan

h. Waktu Penelitian : 15 jam/minggu

4. Anggota III

a. Nama : Andri Marta, S.I.P, M.I.P.

b. Jenis Kelamin : Laki-Laki

c. NIP : -

d. Disiplin Ilmu : Ilmu Pemerintahan/Politik

e. Pangkat/Golongan : -

f. Jabatan Fungsional/ Struktural: Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan UNILA

g. Fakultas/Jurusan : FISIP/Ilmu Pemerintahan

h. Waktu Penelitian : 15 jam/minggu

DAFTAR PUSTAKA

- Assauri, Sofjan. 2013. *Strategic Management: Sustainable, Competitive Advantages*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Effendy, Onong Uchjana. 2003. *Ilmu Komunikasi: Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Fung, Archon dkk. 2007. *Full Disclosure : The Politics, Perils and Promise of Targeted Transparency*. New York : Cambridge University Press.
- Kodoatie, Robert J, dan Rustam Syarif, 2006. *Pengelolaan Bencana Terpadu*. Jakarta: Yarsif Watampone
- Malik Gismar, Abdul dkk. 2013. *Menuju Masyarakat yang Cerdas dan Pemerintahan yang Responsif(Laporan Eksklusif Indonesia Governance Index 2012)*. Jakarta : Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan(*The Partnership For Governance Reform*).
- Nawawi, Hadari. 2012. *Manajemen Startegi Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan (Dengan Ilustrasi Di Bidang Pendidikan)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Nurrachman, Nani. 2007. *Pemulihan Trauma: Panduan Praktis Pemulihan Akibat Bencana Alam*. Fakultas Psikologi UI. Jakarta: LPSP3
- Gismar, Abdul Malik dkk. 2013. *Indonesia Governance Index 2012: Tantangan Tata Kelola Pemerintahan di 33 Provinsi*. Jakarta: Astana Communication.
- Gismar, Abdul Malik dkk. 2014. *Menata Indonesia Dari Daerah: Laporan Eksekutif Indonesia Governance Index 2014*. Jakarta: Astana Communication.
- Pasalong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Purwanto, Erwan Agus dan Dya Ratih S. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Gava Media
- Singarimbun, dan Sofian Effendi. 2008. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES

Usman, Husaini dan Purnomo Setyadi A. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara

Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sembiring, Sentosa. 2009. *Himpunan Perundang-undangan RI: Penanggulangan Bencana*. Bandung: Nuansa Aulia

Soeladi. 1995. *Manajemen Bencana Alam*. Yogyakarta: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Dokumen :

Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana. 2007. *Panduan Pengenalan Karakteristik Bencana dan Upaya Mitigasinya di Indonesia*. Jakarta.

UU RI Nomor 24. 2007. *Penanggulangan Bencana Indonesia*. Indonesia.

BNPB. 2008. *Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang "Pedoman Penyusunan Bencana Penanggulangan. Bencana"*. Jakarta